

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-AUDIT* PADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

RIZKI RACHMADIA

NIM : 2012310008

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

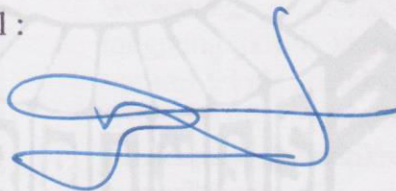
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rizki Rachmadia
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 4 November 1993
N.I.M : 2012310008
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Audit dan Perpajakan
Judul : Analisis Penerapan Sistem *E-Audit* Pada Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Perwakilan Jawa Timur

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

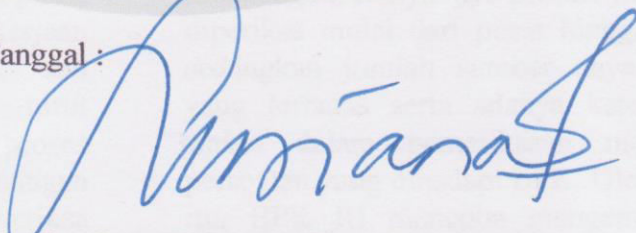
Tanggal :



(Prof. Dr. Drs. R. Wilopo, Ak., M.Si, CFE)

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Tanggal :



(Dr. Luciana Spica Almilia S.E., M.Si., QIA)

ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-AUDIT* PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN JAWA TIMUR

Rizki Rachmadia

2012310008

STIE Perbanas Surabaya

Email : maychrismadia@gmail.com

ABSTRACT

Audit Board of the Indonesian Republic (BPK) utilizing the development of information technology by creating e-audit system in order to facilitate the audit process. System which created in 2011 is constantly being developed and implemented in 2015. This study aimed to analyze the implementation of e-audit system on BPK RI Representative in East Java. This study use interviews and documentation in order to obtain information related to the implementation of e-audit system. Data analysis techniques in this study include data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study explained that the e-audit system becoming a container of various data used by the auditor in conducting the audit process, both the data from related entities as well as data from other related parties. Data from the entity transmitted using consolidator agent installed on a entity device, to the agent consolidator master which installed in BPK devive , then the data is processed and upoaded into the Data Center in Portal e-Audit, so that the data is ready for use.

Key words : e-audit, BPK, BPK RI Representative in East Java, audit, auditor, information technology.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang terjadi secara terus-menerus tentu akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek. Di Indonesia sendiri pemanfaatan perkembangan teknologi tersebut dilaksanakan dalam banyak bidang termasuk bidang perekonomian, pemerintahan, pendidikan dan bidang lainnya. Adanya pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu membantu pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Pemanfaatan teknologi turut diimplementasikan pada proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara umum teknis pelaksanaan pemeriksaan di BPK dibagi ke dalam dua kegiatan, yaitu pelaksanaan pemeriksaan dan pengakhiran pemeriksaan. Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan adalah kegiatan yang dilaksanakan ketika tim pemeriksa berada di lapangan. Banyaknya Entitas yang harus diperiksa mulai dari pusat hingga daerah sedangkan jumlah sumber daya auditor yang terbatas serta adanya keterbatasan waktu dalam pemeriksaan merupakan persoalan yang dihadapi BPK. Oleh karena itu, BPK RI mencoba mengembangkan sistem dengan berbasis teknologi

informasi yang disebut *e-audit* (elektronik audit) sebagai upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pemeriksaan.

Sistem *e-audit* sendiri telah diperkenalkan sejak tahun 2010 dan telah mendapat dukungan yang besar dari pihak pemerintahan pada pertemuan antara Presiden dan Kepala Lembaga Negara di Bogor pada tanggal 21 Januari 2010. Sedangkan BPK RI perwakilan Jawa Timur sendiri telah menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 19 Mei 2011. Dalam penerapan sistem baru yang berbasis teknologi informasi ini tentu BPK RI perlu beberapa waktu untuk melakukan uji coba dan penerapan secara bertahap hingga saat pelaksanaan secara penuh, yang direncanakan pada tahun 2015. Proses penerapan dimulai dengan dilakukannya *piloting* yaitu uji coba penerapan sistem *e-audit* pada beberapa Entitas secara bertahap. Hal ini dilakukan mulai dari skala kecil dan akhirnya meluas. Dengan adanya sistem *piloting* ini, penerapan sistem *e-audit* oleh BPK dapat dikembangkan sekaligus dievaluasi saat menghadapi kendala sehingga sistem *e-audit* akan siap untuk diterapkan secara penuh.

Uji coba dengan cara *piloting* ini secara terus menerus dikembangkan mulai tahun 2011 hingga tahun 2014, *piloting* ini tentu diharapkan dapat mendukung pemeriksaan yang riil pada ketiga jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, dan Pemeriksaan Kinerja, serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan keuangan karena ruang lingkup pemeriksaan dapat diperluas dan pemeriksaan dapat berfokus pada beberapa daerah yang berisiko. Namun, hingga saat ini perkembangan mengenai sistem *e-audit* sendiri belum terlalu dipublikasikan. Terlebih lagi, terdapat beberapa kendala-kendala menuju proses penerapan secara penuh pada tahun ini.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai penerapan sistem *e-audit* oleh BPK RI terutama perwakilan Jawa Timur, mengingat BPK RI perwakilan Jawa Timur merupakan kantor perwakilan dengan Entitas terbanyak yaitu 39 Entitas terperiksa. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari penerapan sistem *e-audit* yang direncanakan telah terlaksana secara penuh ditahun 2015 ini. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini agar dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem *E-audit* Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur”.

RERANGKA TEORITIS

Audit

Definisi audit menurut Mulyadi (2002:9), suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sedangkan menurut Arens *et al* (2000:9), proses audit merupakan proses yang ditempuh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi dari suatu Entitas untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

menurut Sukrisno Agoes (2004:10) jika ditinjau dari luas pemeriksaan, maka jenis audit dibagi menjadi dua ,yaitu Pemeriksaan Umum (*General Audit*), Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*). Pemeriksaan Umum

(*General Audit*) merupakan suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*) adalah suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Jika ditinjau berdasarkan jenis pemeriksaannya, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi empat, yakni Audit Operasional (*Management Audit*), Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), Audit Komputer (*Computer Audit*). Sedangkan untuk sektor publik, proses audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan lingkup Pemeriksaan keuangan, Pemeriksaan kinerja, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Technology Acceptance Model (TAM)

Terdapat beberapa model yang dibangun untuk menganalisis faktor-faktor diterimanya suatu penggunaan teknologi komputer atau sistem informasi, diantaranya tercatat pada berbagai literatur dan referensi seperti *Theory of Reasoned Action* (TRA), *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Penelitian ini didasarkan pada TAM yang dikembangkan oleh Davis (1989) dan mengacu pada penelitian Natalie Tangkie mengenai "Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI". Peneliti melakukan analisis penerapan sistem *e-audit* menggunakan empat konstruk utama dari TAM yang digunakan pada penelitian

Natalie Tangkie, yaitu Persepsi Pengguna terhadap Kemudahan dalam Menggunakan Sistem (*Perceived Ease of Use*), Persepsi Pengguna terhadap Kegunaan Sistem (*Perceived Usefulness*), Sikap Pengguna terhadap Penggunaan Sistem (*Attitude Toward Using*), dan Penerimaan Pengguna terhadap Sistem (*Acceptance of System*). Konstruk TAM yang digunakan peneliti sesuai dengan yang digunakan oleh Natalie Tangkie pada penelitian terdahulu, dimana Penerimaan Pengguna (*Acceptance of System*) terbentuk dari Kecenderungan Tingkah Laku (*Behavioral Intention*) dan Pemakaian Aktual (*Actual Usage*).

a. *Perceived Ease of Use*

Menurut Davis (1989), *perceived ease of use* sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Davis (1989) dalam penelitiannya mengukur *perceived ease of use* menggunakan indikator pertanyaan mengenai *Easy of Learn, Controllable, Clear & Understandable, Flexible, Easy to Become Skillful, dan Ease to Use*. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan indikator kemudahan sistem untuk dipelajari, fleksibel, kemampuan sistem dalam mengontrol pekerjaan, serta kemudahan sistem untuk digunakan.

b. *Perceived Usefulness*

Gahtani dalam Davis (2001) menyatakan *Perceived Usefulness* atau kegunaan yang dirasakan didefinisikan sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Davis (1989) mengukur *perceived usefulness* melalui indikator seperti *Work More Quickly, Job Performance, Increase Productivity, Effectiveness, Makes Job Easier, dan Useful*. Peneliti mengukur *Perceived Usefulness* menggunakan pertanyaan seputar kemampuan sistem untuk meningkatkan kinerja pekerjaan,

kemampuan sistem untuk menjadikan mempermudah pekerjaan serta keseluruhan teknologi yang digunakan dirasakan lebih bermanfaat.

c. *Attitude Toward Using*

Davis (1989), mendefinisikan *attitude toward the system*, yang dipakai dalam TAM sebagai suatu tingkat penilaian terhadap dampak yang dialami oleh seseorang bila menggunakan suatu sistem tertentu dalam pekerjaannya. Natalie Tangkie dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Attitude toward the system* dapat diukur dengan bagaimana sikap pengguna terhadap sistem, apakah pengguna merasa senang dalam penggunaan sistem tersebut maupun mengakui perlunya sistem tersebut untuk meningkatkan pekerjaannya.

d. *Acceptance of System*

Natalie Tangkie menyederhanakan konstruk *Behavioral Intention* dan *Actual Usage* menjadi *Acceptance of System*. Natalie Tangkie melakukan modifikasi ini sesuai dengan TAM yang digunakan oleh Said Al-Gahfani dalam penelitiannya "*The Applicability of TAM outside North America : An Empirical Test in the United Kingdom*" (Said Al-Gahtani 2001). *Acceptance of System* diukur dengan menggunakan pertanyaan seputar penerimaan pengguna terhadap sistem yang diaplikasikan.

E-audit

Sistem *e-audit* yang dilaksanakan oleh BPK RI memiliki empat komponen utama, antara lain :

1. Komponen Penyajian Informasi dan Korespondensi

- a. Portal *e-audit*, yang merupakan aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai media utama pihak internal BPK dan pihak Entitas terperiksa dalam mengakses berbagai informasi terkait pemeriksaan.

Dalam portal *e-audit* ini tidak ada proses komunikasi antar Entitas, karena Entitas hanya dapat mengenal dan berkomunikasi dengan e-BPK dan dengan data Entitas yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan portal *e-audit* bagi Entitas bersifat *Mutual Exclusion Data Exchange* dengan BPK. Sedangkan mekanisme keamanan atas informasi pada portal *e-audit* adalah melalui peretujuan, otorisasi, otentifikasi, dan pemisahan informasi.

- b. Command server, digunakan sebagai jembatan bagi pemeriksa untuk menggunakan pusat data BPK melalui Portal *e-audit*. Command server merupakan sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan beberapa *workstation* atau komputer yang berhubungan dengan sistem *e-audit*. Di dalam command center terdapat fungsi *end user computing* yaitu suatu sistem untuk mengembangkan sarana otomatis dan membuat peloporan sendiri berbasis Teknis Audit Berbantu Komputer (TABK). Beberapa *software* berbasis TABK yang telah disiapkan sebagai alat bantu pemeriksa dalam menganalisis data adalah ACL, Arbutus, dan MS. Excel.

2. Pusat Data

Merupakan pusat pengumpulan dan pengolahan data mentah atau data olahan dari Entitas yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pusat Data terdiri dari tiga sub komponen, antara lain :

- e. *BPK Data Service*, digunakan untuk pengolahan data elektronik pada pusat data sesuai dengan alur proses yang telah didefinisikan oleh sistem. Komponen ini berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dengan database sehingga antara aplikasi dan

database tidak berhubungan secara langsung. Komponen ini juga berfungsi untuk menjalankan fitur otomatisasi proses pemeriksaan di BPK.

f. *Data Warehouse*, terdiri dari *database* dan fungsi-fungsi perancangan struktur data pelaporan dan penyajian data analisis sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. dalam pembentukannya, *data Warehouse* dalam sistem *e-audit* dibangun dengan mengelompokan data menurut Entitas (Kementrian/Lembaga dan Bank Indonesia/BUMN/BUMD/BLU/BLU D, dan Pemerintah Daerah).

g. *Data Quality Management*, terdiri dari beberapa fitur yang dapat melakukan standarisasi data dari beberapa sumber. Fitur tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi duplikasi dengan berbagai tingkat kemiripan, memberikan saran atau pemilihan data yang dianggap paling akurat, serta menyediakan tempat penyimpanan sementara bagi data yang tidak konsisten sebelum dilakukan standarisasi. Fitur ini membantu BPK untuk mendapat data yang bersih dan siap digunakan.

aplikasi yang berfungsi sebagai ETL (extract, transform, load) dari sumber data yang ada di *database* Entitas ke pusat data BPK. Komponen ini dikembangkan untuk mengkonsolidasikan data elektronik dari Entitas ke Pusat Data BPK melalui saluran komunikasi yang disepakati bersama. Fitur ini dapat memberikan *early waarning system* dalam bentuk notifikasi secara otomatis ketika proses ETL setelah pengiriman data dan identifikasi tidak sesuai terhadap hasil konsolidasi data Entitas dalam sistem *e-audit*.

4. *Document Management*

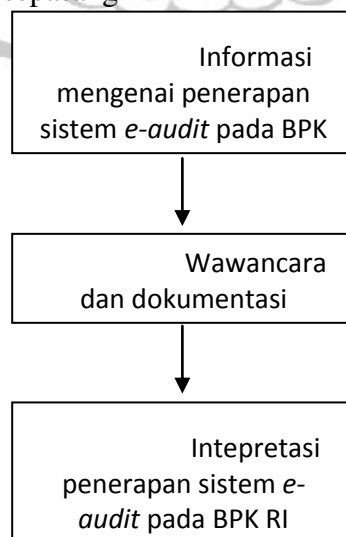
Document Management merupakan sistem yang memproses dokumen non elektronik pemeriksaan seperti dokumen *hardcopy* Laporan Keuangan menjadi dokumen elektronik serta mengelola dokumen elektronik kegiatan pelaksanaan pemeriksaan, termasuk Kertas Kerja Pemeriksaan Elektronik. *Document Management* meliputi kegiatan penyimpanan, penomoran, indexisasi, publikasi, tracing, pencarian, dan pengarsipan dokumen elektronik. (Laporan Tahunan BPK RI, 2014).

3. Master Agen Konsolidator dan Agen Konsolidator

Komponen ini merupakan sepasang

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

METODE PENELITIAN



Gambar 1
Kerangka

Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap sistem e-audit yang di terapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur, sehingga diperlukan data yang mendalam mengenai sistem e-audit agar peneliti dapat menggambarkan penerapan sistem e-audit pada Perwakilan Jawa Timur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder pada penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara dengan metode *semi-structured interview* (wawancara semi terstruktur) dimana penanya telah menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk telah diolah. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh peneliti dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen terkait dengan sistem *e-audit* BPK RI.

Untuk memastikan validitas data, maka peneliti melakukan uji validitas terhadap data dengan melakukan triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan pengujian data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama akan tetapi dengan teknik atau cara yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi teknik dengan cara membandingkan data hasil wawancara dari informan dan mencocokkan dengan data dokumentasi mengenai penerapan sistem *e-audit* pada BPK RI. Dengan membandingkan data dari teknik yang berbeda peneliti dapat melihat adanya persamaan atau perbedaan pada data-data tersebut. Bila data yang dihasilkan dari semua teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data untuk dapat menentukan data mana yang dianggap paling benar.

Teknik analisis data

Metode teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan saat peneliti melakukan penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992:16) di dalam metode analisis data kualitatif deskriptif, terdapat tiga jalur analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pembahasan (penarikan kesimpulan). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian, peneliti akan mendapat berbagai data atau informasi, baik dari literatur maupun hasil wawancara dan pendokumentasian mengenai penerapan sistem *e-audit* di BPK RI perwakilan Jawa Timur, selanjutnya peneliti akan memfokuskan informasi-informasi tersebut sesuai dengan topik serta tujuan penelitian, sedangkan penyajian data pada penelitian ini merupakan pembahasan data-data serta informasi yang telah diperoleh peneliti selama melakukan penelitian, selanjutnya Informasi yang telah diperoleh peneliti disajikan dalam bentuk naratif maupun bagan, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana penarikan kesimpulan dilakukan peneliti disesuaikan dengan informasi atau data yang diperoleh selama pengumpulan data, dan selanjutnya data dideskripsikan serta disimpulkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Sistem E-audit

Ditinjau dari definisinya, proses *e-audit* memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan audit pada umumnya, hanya saja pengumpulan bukti dan data-data terkait pemeriksaan pada *e-audit* dilakukan dengan pemanfaatan teknologi dan lebih terintegrasi. Sistem *e-audit* menjadi wadah dari berbagai data terkait Entitas terperiksa. Untuk data yang berasal dari Entitas, BPK menyediakan suatu

sistem konsolidasi data dimana sistem tersebut mengkonsolidasikan data dari Entitas ke Pusat Data BPK RI. Sistem tersebut terdiri dari Master Agen Konsolidator dan Agen Konsolidator. Master Agen Konsolidator dipasang pada perangkat BPK RI Perwakilan Jawa Timur, sedangkan Agen Konsolidator diletakkan pada perangkat Entitas atau Pemerintah Daerah Jawa Timur. Agen Konsolidator yang diletakkan pada Entitas berfungsi untuk melakukan kompresi dan enkripsi data Entitas. Master Agen Konsolidator yang terletak di BPK berfungsi untuk menerima file data yang dikirimkan oleh Entitas dan meneruskan ke Pusat Data BPK. Pengaksesan data pada Portal *E-audit* hanya dapat dilakukan oleh Pemeriksa yang telah memiliki Surat Tugas Pemeriksaan dan dilakukan pada batasan waktu tertentu.

Penggunaan sistem *e-audit* menciptakan sinergi data elektronik dari Entitas, BPK, maupun Pihak terkait lainnya. Penggunaan data elektronik ini tentu mengharuskan Pemeriksa menggunakan TABK dalam proses pemeriksaan. *Software* yang disediakan sistem *e-audit* adalah ACL, SQL, dan Arbutus. Staf Pemeriksa mengungkapkan bahwa Pemeriksa BPK RI Perwakilan telah mendapatkan peatihan dan evaluasi mengenai penggunaan *software* TABK dan penggunaan sistem *e-audit*. Biro Teknologi Informasi Pusat telah menyediakan petunjuk-petunjuk penggunaan aplikasi dan sistem yang dapat dijadikan panduan bagi pemeriksa. Hal yang sama juga berlaku pada Staf Subbagian Umum dan Teknologi Informasi. Beliau mengungkapkan bahwa dalam rangka persiapan penerapan sistem *e-audit*, Staf Subbagian Umum dan TI telah menerima pelatihan melalui pusdiklat yang diadakan oleh Biro TI BPK Pusat. Sehingga dalam penerapannya, Staf Subbagian Umum dan TI dapat mengolah data dan melakukan konversi data-data tanpa mengalami kesulitan. Berdasarkan

informasi dari kedua pengguna *e-audit* tersebut, terlihat bahwa sistem *e-audit* ini merupakan sistem yang diterima dengan baik dan tidak memiliki kesulitan dalam penggunaannya.

Hasil yang cukup signifikan dari pemanfaatan sistem *e-audit* ini terlihat dari ditemukannya temuan-temuan terkait perjalanan dinas di berbagai SKPD. BPK RI Perwakilan Jawa Timur salah satunya, pada tahun 2014 telah menemukan kurang lebih 4.000 perjalanan dinas bermasalah (Koran Jawa Pos, 24 Desember 2014). Pemerolehan hasil atas penyimpangan perjalanan dinas dengan menggunakan sistem *e-audit* ini jauh lebih baik dibanding dengan cara manual. Kinerja sistem *e-audit* seperti ini sejalan dengan misi BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk berperan aktif dalam mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang dari sistem *e-audit*, yaitu untuk menedegah serta mengurangi tindak korupsi dan kolusi yang dapat merugikan bagi negara.

Analisis data *Technology Acceptance Model* (TAM)

Konstruk pertama adalah *Perceived Ease of Use*, dimana *Perceived Ease of Use* melihat persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan sistem. Informan dalam penelitian ini mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro IT Pusat untuk menyediakan juknis penggunaan serta pelatihan-pelatihan terhadap pengguna sistem *e-audit* telah sangat membantu. Baik Staf Pemeriksa dan Staf Subbagian Umum yang mengolah data-data elektronik tidak menemukan kesulitan dalam pengoperasian sistem *e-audit*. Berdasarkan pernyataan dari kedua informan, maka dapat diketahui bahwa pengguna memahami sistem *e-audit* dan tidak kesulitan dalam penggunaannya dan dapat diterima oleh pengguna dengan baik. Selanjutnya adalah *Perceived Usefulness*

yang melihat bagaimana persepsi pengguna terhadap kegunaan dari sistem e-audit. Salah satu harapan dari diterapkannya suatu sistem adalah dapat meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Hal ini juga berlaku pada penerapan sistem *e-audit* oleh BPK RI. Ketua BPK RI periode 2011-2015, Bapak Hadi Purnomo mencetuskan sistem *e-audit* dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja BPK RI dalam melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara. Informan mengungkapkan sistem *e-audit* ini meningkatkan kinerja dalam proses pemeriksaan karena konsep dari sistem ini sudah jelas, sehingga memudahkan pekerjaan. Terlebih lagi, pada tahun 2014 BPK RI Perwakilan telah menemukan banyak penyalahgunaan dana perjalanan dinas dengan menggunakan sistem *e-audit*. Staf Pemeriksa juga menjelaskan bahwa dengan adanya *e-audit*, pemeriksa tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan pihak luar dan fokus terhadap proses pemeriksaan. Sedangkan dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa menggunakan *software* TABK seperti ACL, SQL, dan Arbutus.

Konstruk selanjutnya adalah *Attitude Toward Using*. *Attitude Toward Using* menilai bagaimana sikap pengguna terhadap sistem informasi yang diterapkan. Peneliti mencari informasi bagaimana perasaan pengguna, yakni Pemeriksa dan Staf Subbagian Umum dan TI terhadap sistem *e-audit*. Baik Pemeriksa dan Staf Subbagian Umum dan TI memiliki persepsi yang berbeda mengenai sistem *e-audit*. Sistem *e-audit* dinilai cukup membantu dalam proses pemeriksaan oleh Pemeriksa, sehingga pihak Pemeriksa merasa tidak terbebani terhadap penerapan sistem *e-audit*. Akan tetapi, Berbeda dengan Pemeriksa, Staf Subbagian Umum dan TI yang bekerja sebagai pengolah data merasa sedikit terbebani dengan adanya sistem *e-audit*. Hal ini dikarenakan banyaknya data-data yang masuk sehingga data yang diolahpun tentu semakin banyak.

Perbedaan format atau sistem yang digunakan dalam pengolahan data elektronik juga menjadikan pekerjaan pengolahan data semakin rumit. Melalui pernyataan diatas, dapat diketahui kedua informan dengan tugas atau pekerjaan yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda pula. Akan tetapi, ketika ditanyai mengenai perihal perlunya penerapan sistem *e-audit* pada BPK RI Perwakilan Jawa Timur, keduanya sepakat menjawab bahwa sistem *e-audit* diperlukan guna meningkatkan kinerja pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Konstruk yang terakhir adalah *Acceptance of System*. *Acceptance of System* merupakan konstruk yang melihat bagaimana pengguna menerima sistem informasi yang diterapkan. Sistem *e-audit* yang diterapkan pada BPK RI Perwakilan Jawa Timur telah diterima baik oleh pengguna dari pihak BPK maupun pengguna dari pihak Entitas. Hal ini terlihat dari pendapat kedua informan yang sepakat bahwa sistem *e-audit* diperlukan dalam membantu proses pemeriksaan. Sedangkan Entitas yang ada di Jawa Timur telah menerima sistem *e-audit* dan telah memanfaatkan adanya sistem *e-audit*, karena seluruh Entitas telah menandatangani nota kesepahaman dan juknis *e-audit*. Akan tetapi kembali lagi pada kemampuan Entitas yang berbeda-beda, respon yang diberikan tentu tidak sama. Terdapat Entitas yang sangat antusias dan ada pula Entitas yang masih perlu bimbingan.

Pembahasan

Sistem *e-audit* yang diterapkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur bukanlah sebuah metode baru yang merubah metode serta prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan BPK. Sistem ini adalah sebuah *tool* yang ditambahkan pada prosedur pemeriksaan oleh BPK. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tetap tidak berubah, yakni Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, dan Tindak Lanjut. Sistem *e-audit* diimplementasikan secara intens pada tahap Pelaksanaan, meliputi meminta dokumen, mengakses data, meminta keterangan kepada pihak terkait, dan mengambil sampel. Akan tetapi, portal *e-audit* memfasilitasi tahap pelaporan dan tindak lanjut. Sistem *e-audit* ini menampung berbagai data terkait pemeriksaan dalam satu tempat yakni Pusat Data BPK. Hal ini memungkinkan pemeriksa dan entitas untuk melakukan akses data melalui satu pintu, yakni Portal *E-audit*. Pemeriksa dapat mengakses data terkait entitas dan pihak pendukung lainnya, sedangkan entitas dapat melihat informasi mengenai status pemeriksaan, hasil pemeriksaan, progres temuan suatu pemeriksaan, hingga rekomendasi yang diberikan atas pemeriksaan. Bagi BPK, adanya portal *e-audit* akan mengurangi pekerjaan administratif di BPK terkait perekaman tindak lanjut, karena entitas dapat mengakses secara online melalui portal *e-audit*.

Pemanfaatan sistem *e-audit* dilakukan pemeriksa dalam pemerolehan data dan bukti-bukti audit serta pemeriksaan data-data tersebut, sehingga pada saat pemeriksaan lapangan, Pemeriksa telah memiliki fokus pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan sistem *e-audit*. Sesuai dengan salah satu keunggulan sistem *e-audit*, yakni diharapkan menjadi *early warning system* terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Akan tetapi, waktu yang diberikan kepada pemeriksa untuk mengakses data terbatas pada waktu penugasan. Waktu yang diberikan cenderung singkat dan terlalu dekat dengan pemeriksaan lapangan. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem *e-audit* sebagai *early warning system* dirasa kurang optimal. Hal ini dikarenakan Pemeriksa kurang memiliki data yang lebih awal untuk dianalisis. Penerimaan sistem *e-audit* oleh pengguna dilihat dari aspek *Technology Acceptance Model*, terlihat pengguna baik dari

Pemeriksa maupun Staf Subbagian Umum dan TI dapat menerima sistem *e-audit* dengan mudah dan tanpa menghadapi kesulitan yang berarti. Dari aspek *Perceived ease of use*, kedua pengguna mengungkapkan bahwa sistem *e-audit* mudah dipahami dan mudah digunakan. Terlebih lagi BPK Pusat dan Biro TI telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelatihan mengenai sistem *e-audit*, serta menyediakan panduan-panduan guna membantu pengguna.

Kedua pengguna mengakui bahwa mereka merasakan kegunaan sistem *e-audit* dalam meningkatkan kinerja BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Kedua informan menyatakan bahwa sistem *e-audit* yang diterapkan tersebut memudahkan dan mempercepat proses pemeriksaan, karena Pemeriksa dan Pengolah data cukup mengakses data melalui portal *e-audit* untuk memperoleh data terkait entitas terperiksa. Selain itu, sistem *e-audit* juga berkontribusi untuk meningkatkan keefektifan kinerja BPK RI Perwakilan Jawa Timur, terlihat dari sejumlah temuan-temuan dengan nominal yang besar pada tahun 2014 terkait perjalanan dinas. Oleh karena itu dari aspek *Perceived Usefulness*, sistem *e-audit* telah terbukti meningkatkan kinerja pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Baik Pemeriksa dan Staf Subbagian Umum dan TI memiliki persepsi *Attitude toward using* yang berbeda. Pemeriksa merasakan manfaat dari *e-audit* dalam proses pemeriksaan, akan tetapi Staf Subbagian Umum dan TI selaku pengolah data merasa sistem *e-audit* ini cenderung menambah perkerjaannya. Hal ini dikarenakan banyaknya data elektronik yang harus diolah dan divalidasi, terlebih lagi pengolah data harus menghadapi permasalahan perbedaan format dari Entitas-entitas yang ada di Jawa Timur. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan pengolah data harus berupaya lebih untuk mengkonversi data ke format yang sesuai

dan dapat di konsolidasi oleh sistem. Pekerjaan pengolah data akan menjadi lebih kompleks lagi ketika entitas terlambat dalam mengirimkan data-datanya.

Meskipun telah diterapkan secara penuh, sistem *e-audit* yang diterapkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur masih menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi pada penerapan sistem *e-audit* ini cenderung mengenai data dari entitas. Kendala yang paling umum adalah masih belum seragamnya aplikasi yang digunakan oleh Entitas. Masing-masing Entitas memiliki aplikasi yang berbeda dalam mengolah administrasi pemerintahannya, sehingga menimbulkan perbedaan format pada data antara satu Entitas dengan Entitas lainnya. Apabila format data dari Entitas ini berbeda dengan format data yang digunakan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur, tentu akan diperlukan tenaga dan waktu lebih untuk mengkonversi data-data tersebut. Selain kendala mengenai perbedaan aplikasi pengolahan data, kendala lain yang menjadi perhatian adalah pengiriman data dari Entitas diperiksa.

Pengiriman data yang terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dapat berpengaruh pada penyelesaian pengolahan data yang tepat waktu. Karena, data-data entitas yang dikirimkan ke master agen konsolidator masih perlu di olah bahkan dikonversi sesuai dengan format yang digunakan BPK RI Perwakilan Jawa Timur sebelum dimasukkan ke Pusat Data BPK pada Portal *E-audit*. Apabila pengirim data dari Entitas tidak sesuai dengan waktu yang disepakati tentu proses pengolahan menjadi tidak maksimal atau tidak tepat waktu sehingga data. Ketika data tersebut belum *ter-upload* pada Pusat Data BPK secara otomatis, Pemeriksa masih belum dapat melakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab sebelumnya serta didukung dengan adanya hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa Sampai dengan tahun 2015 seluruh entitas di Jawa Timur telah menandatangani keputusan bersama mengenai juknis *e-audit*, sampai dengan tahun 201 BPK RI Perwakilan Jawa Timur telah memasang agen konsolidator pada seluruh entitas yang berada di Jawa Timur, masih terdapat entitas yang kurang tertib dalam mengirimkan data sehingga pihak BPK RI Perwakilan Jawa Timur harus mengirimkan surat pemberitahuan, keterlambatan pengiriman data yang terjadi mempengaruhi proses pengolahan data sehingga dapat menimbulkan adanya keterlambatan penyediaan data pada Pusat Data BPK, masing-masing entitas yang ada di Jawa Timur memiliki karakteristik yang tidak seragam dalam penggunaan aplikasi pengolah administrasi daerahnya sehingga menyebabkan Staf Subbagian Umum dan TI perlu berupaya lebih dalam pengolahan data untuk mengkonversi data tersebut agar dapat digunakan oleh pemeriksa, dan persepsi pengguna terhadap sistem *e-audit* dilihat dari aspek *Technology Acceptance Model* yang menunjukkan bahwa pengguna dapat menerima sistem dengan baik dan tidak menemui kesulitan dalam penggunaannya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni (1) peneliti tidak dapat melakukan observasi terhadap penggunaan sistem *e-audit* pada proses pengolahan data karena mengandung data-data penting dari entitas, (2) peneliti tidak dapat melakukan observasi terhadap penggunaan sistem *e-audit* oleh pemeriksa, karena informan sedang tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga tidak memiliki surat tugas untuk mengakses Pusat Data BPK, (3) Akses Warta BPK tahun terbaru yang cukup sulit karena belum dipublikasikan pada *website* resmi BPK, (4) Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara hanya kepada dua informan,

sehingga hasil wawancara mengandung unsur pribadi dari informan dan kurang kuat untuk dapat digeneralisasikan.

Berdasarkan pada hasil, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya, bahwa ada keterbatasan dalam pencarian informan dan literatur, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan lebih bervariasi. Selain itu, Instrumen penelitian yang digunakan selanjutnya diharapkan lebih bervariasi, tidak hanya dengan wawancara sehingga informasi yang diperoleh lebih detail. Dan yang terakhir adalah peneliti selanjutnya sebaiknya memasukkan pertanyaan yang bersifat negatif, agar jawaban yang diberikan lebih detail.

DAFTAR RUJUKAN

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Computer Assisted Audit Techniques. *Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Indonesia*. Bandung.
- Arens, A., and Loebbecke K. 2000. *Auditing An Integrated Approach*. Eighth Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2011. Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Online: http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-voli-juli-2011_hal_6_23.pdf (diakses 25 September 2015).
- _____. 2011a. Menuju E-audit yang Paripurna. Online: www.bpk.go.id/web/files/2011/10/Hal-6-231.pdf (diakses 22 September 2015)
- _____. 2011b. Rencana Strategis BPK 2011-2015. Online: http://www.bpk.go.id/web/?page_id=8 (diakses 22 September 2015)
- _____. 2011. Selayang Pandang E-audit. Online: <http://www.bpk.go.id/page/selayang-pandang> (diakses 22 Agustus 2015).
- _____. 2014. Warta BPK Edisi 02 - Vol. IV - Februari 2014.
- _____. 2014. Warta BPK Edisi 03 - Vol. IV - Maret 2014.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. *Management science*, 35(8), 982-1003. Online : <http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.35.8.982> (diakses 15 November 2015)
- Hartoyo, A. D. (2011). Upaya Peningkatan Kinerja Pemeriksaan BPK RI menggunakan Computer Assisted Audit Techniques. *Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Indonesia*. Bandung.
- Laudon, K.C., Jane P. Laudon. 2004. *Management Information Systems*. 8th edition. New Jersey : Prentice- Hall, Inc.
- Masood, A., & Lodhi, R. N. (2015). Factors Affecting the Success of Government Audits: A Case Study of Pakistan. *Universal Journal of Management*, 3(2), 52-62.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta.

Nindyastuti, D., & Kiswara, E. (2014). Faktor-faktor Efektivitas Sistem *E-audit* (Studi Empirik Pada *E-audit* Perjalanan Dinas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 275-285.

Okab, R. (2013). Electronic Audit Role in Achieving Competitive Advantages and Support the Strategy of the External Audit in Auditing Offices in the Hashemite Kingdom of Jordan. *International Business Research*, 6(6), p181.

Pradita, A., & Nuswantara, D. A. (2014). Implementasi *E-audit* dalam Meningkatkan Fungsi Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada BPK-RI. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 2.

Robert K. Yin. 2012. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Stoel, D., Havelka, D., & Merhout, J. W. (2012). An analysis of attributes that impact information technology audit quality: A study of IT and financial audit practitioners. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13(1), 60-79.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Penerbit Alfabeta

Sutarto, D. (2015). Analisis Pelaksanaan *E-audit* Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3.

Tangke, N. (2005). Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Dengan Menggunakan

Technology Acceptance Model (TAM) Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6.